



Article history:

Received: 08 August 2025

Revised: 03 September 2025

Accepted: 07 September 2025

Available online: 11 September 2025

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)

Yunita Sri Rahayu, Raden Budi Hendaris

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani

*Corresponding Author: yunitasri_21p048@ak.unjani.ac.id¹, budi.hendaris@lecture.unjani.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel tingkat kekayaan daerah, ketergantungan daerah, dan upaya pajak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di 27 kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2023. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD dan PDRB. Jumlah populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel tingkat kekayaan daerah, ketergantungan daerah dan upaya pajak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023. Namun secara parsial 3 variabel independen pada penelitian ini menunjukkan variasi yang berbeda, yaitu variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, variabel ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan variabel upaya pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.

Kata kunci : tingkat kekayaan daerah, ketergantungan daerah, upaya pajak, kinerja keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of regional wealth level, regional dependence, and tax efforts on the financial performance of local governments in 27 regencies and cities in West Java Province during the 2019–2023 period. The data used are sourced from secondary data in the form of APBD Budget Realization Reports and GRDP. The study population covers all district/city governments in West Java Province during that period. The analysis technique used is multiple linear regression. The results of this study reveal that simultaneously there is a significant influence between the variables of regional wealth level, regional dependence, and tax efforts on the financial performance of local governments in regencies and cities in West Java Province in 2019–2023. However, partially the 3 independent variables in this study show different variations, namely the regional wealth level variable has a positive effect on the financial performance of local governments, the regional dependence variable has a negative effect, and the tax efforts variable does not have a significant effect on the financial performance of local governments in regencies and cities in West Java Province in 2019–2023.

Keywords: regional wealth level, regional dependency, tax effort, local government financial performance.

PENDAHULUAN

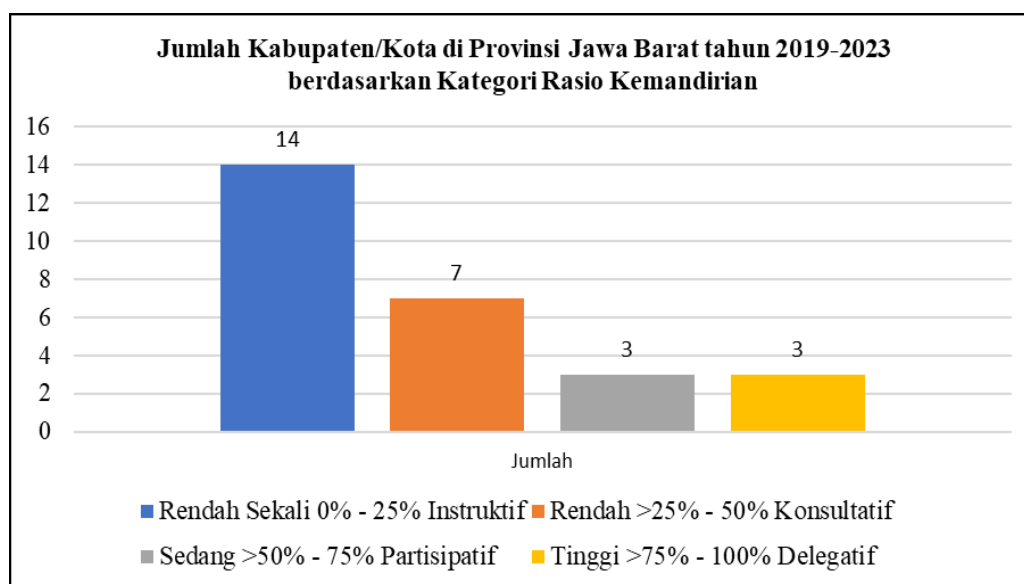
Penerapan desentralisasi di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah (Lestari dkk., 2019). Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Riza & Zuripal, 2023).

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah

yang efisien, serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Putra & Romli, 2020). Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemandirian daerah, perlu diterapkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan untuk membentuk kinerja keuangan yang solid dan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Primadiva dkk, 2021). Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan (Natoen dkk., 2019). Berbagai instrumen ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengenali serta mengembangkan potensi fiskal secara mandiri, guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan birokrasi terpusat (Hendaris & Sastradipraja, 2024).

Penelitian Nurhayati dkk (2021) kinerja keuangan daerah menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja berdasarkan sistem keuangan yang diatur melalui kebijakan peraturan perundang-undangan dalam satu periode anggaran. Kinerja keuangan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah, karena mencerminkan sejauh mana anggaran dalam APBD dapat diserap dan direalisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Setiani & Ismunawan, 2022).

Terkait isu kinerja keuangan daerah, Provinsi Jawa Barat secara umum menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif tinggi. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan antarwilayah, di mana beberapa daerah masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian Fadhli dkk. (2023) menyebutkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui rasio antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Pendapatan Transfer yang diterima.



Sumber: data olahan

Gambar 1
Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 berdasarkan Kategori Rasio Kemandirian

Berdasarkan data pada gambar tersebut, mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2023 termasuk dalam kategori *Instrukturif*, dengan total 14 daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah. Sebanyak 7 daerah lainnya berada pada kategori *Konsultatif*, yang mencerminkan masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, hanya 3 daerah yang masuk dalam kategori *Partisipatif*, serta 3 daerah lainnya telah mencapai kategori *Delekatif*, yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang kuat serta tingkat kemandirian fiskal yang tinggi. Selanjutnya, kinerja keuangan pemerintah daerah dianalisis berdasarkan rasio kemandirian daerah, yaitu dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Transfer. Rasio ini mencerminkan sejauh mana

suatu daerah mampu membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri tanpa bergantung secara dominan pada dana dari pemerintah pusat.

Tabel 1
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (dalam persentase)

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bandung	25,65	28,51	28,23	26,65	25,79
Kab. Bekasi	82,52	83,40	80,90	75,56	76,90
Kab. Bogor	70,30	68,10	79,54	70,73	70,87
Kab. Ciamis	10,28	11,34	12,06	12,79	10,93
Kab. Cianjur	23,64	19,48	26,75	19,22	21,16
Kab. Cirebon	21,55	21,95	23,38	25,92	23,36
Kab. Garut	12,13	12,83	14,82	11,91	12,69
Kab. Indramayu	19,12	23,85	20,28	20,79	21,89
Kab. Karawang	44,39	46,78	54,52	51,02	51,45
Kab. Kuningan	17,31	12,76	14,97	14,92	14,09
Kab. Majalengka	18,39	18,81	19,04	21,15	21,23
Kab. Purwakarta	28,67	28,87	29,24	33,17	30,54
Kab. Subang	19,22	19,59	20,23	19,34	22,42
Kab. Sukabumi	19,75	22,48	21,13	21,32	21,10
Kab. Sumedang	18,71	19,17	21,05	21,94	22,30
Kab. Tasikmalaya	8,60	9,90	14,01	10,79	10,52
Kota Bandung	70,27	61,56	64,25	75,55	74,13
Kota Bekasi	73,36	72,04	83,95	79,61	80,03
Kota Bogor	69,79	61,60	73,50	70,00	82,18
Kota Cirebon	48,26	38,35	44,37	57,74	57,75
Kota Depok	73,51	71,80	89,76	81,99	85,90
Kota Sukabumi	40,52	43,99	40,03	43,40	48,89
Kota Tasikmalaya	18,49	22,84	29,38	23,14	27,30
Kota Cimahi	38,77	41,36	38,47	42,15	43,73
Kota Banjar	14,86	18,65	21,09	21,69	20,96
Kab. Bandung Barat	23,94	24,86	26,07	34,76	29,77
Kab. Pangandaran	8,95	7,55	15,70	20,88	22,24

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa tren kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2019–2023 menunjukkan bahwa pendapatan transfer yang diterima masih mendominasi dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, tingkat kemandirian fiskal antar daerah terlihat bervariasi dan menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Pada tahun 2023, terjadi penurunan tingkat kemandirian keuangan di beberapa wilayah jika dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain Kabupaten Bandung turun sebesar 25,79%, Kabupaten Ciamis sebesar 10,93%, Kabupaten Cirebon sebesar 23,36%, Kabupaten Kuningan sebesar 14,09%, Kabupaten Purwakarta sebesar 30,54%, Kabupaten Sukabumi sebesar 21,10%, Kabupaten Tasikmalaya sebesar 10,52%, Kota Bandung sebesar 74,13%, Kota Banjar sebesar 20,96%, dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 29,77%. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang maksimal serta cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.



Sumber: data olahan

Gambar 2
Rata-Rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa rata-rata tingkat kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2023 menunjukkan bahwa terdapat lima kabupaten/kota dengan tingkat kemandirian terendah, yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Selain itu, terdapat sembilan kabupaten/kota lain yang juga memiliki rata-rata kemandirian di bawah 25% dan berada pada pola hubungan “Instruktif”, yang mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut sangat rendah sehingga dinilai belum mampu menjalankan otonomi daerah secara optimal. Sementara itu, tujuh kabupaten/kota lainnya memiliki rata-rata kemandirian fiskal antara >25% hingga 50% dan dikategorikan dalam pola hubungan “Konsultatif”, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemampuan keuangan yang rendah namun sudah mulai dapat menjalankan fungsi otonomi daerah secara terbatas. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni tingkat kekayaan daerah, ketergantungan daerah, dan intensitas upaya pajak.

Tingkat kekayaan daerah diukur melalui indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber pendanaan yang berasal dari potensi ekonomi wilayah suatu daerah, yang mencakup penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber sah lainnya (Aziz & Kusumawati, 2024). Kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan secara mandiri. Dengan demikian, semakin besar nilai PAD yang diperoleh, maka kecenderungan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan juga meningkat, sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian kinerja keuangan yang optimal (Nurhayati dkk, 2021). Penelitian Dasmara dkk (2020) juga menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ketergantungan fiskal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian suatu daerah, yang dapat diamati melalui besaran dana perimbangan sebagai bagian dari pendapatan eksternal serta sejauh mana ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat (Aulia & Rahmawati, 2020). Semakin besar proporsi dana perimbangan yang diterima, maka semakin intens pula pengawasan dari pemerintah pusat atas penggunaannya. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai belanja aparaturnya secara mandiri, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menjadi

katalisator dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kinerja keuangan daerah (Afrian dkk, 2016).

Upaya pajak (*tax effort*) merepresentasikan kemampuan dan kesungguhan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Oktavia & Handayani, 2021). Peningkatan *tax effort* menunjukkan efektivitas pengelolaan potensi pajak yang ada oleh pemerintah daerah, yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap kondisi keuangan daerah. Hal ini membuka peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal, memperkuat pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fadhli dkk., 2023). Namun demikian, apabila pengelolaan penerimaan pajak tidak optimal, justru dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterbatasan fiskal dalam pengelolaan anggaran, yang berdampak pada penurunan efektivitas pengeluaran dana transfer dari pemerintah pusat.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian Sedek & Kusumawati (2024) dan Aziz & Kusumawati (2024) menunjukkan tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Defitri dkk. (2021), Setiawan dkk. (2020) dan Lestari dkk (2019) menunjukkan tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Sedek & Kusumawati (2024) dan Setiani & Ismunawan, (2022) menunjukkan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lalu penelitian Nurhayati dkk (2021) menunjukkan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian Aulia & Rahmawaty (2020), Nugraheni & Adi (2020) dan menunjukkan ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya penelitian Fadhli dkk (2023), Riza & Zuripal (2023) dan Oktavianti dkk (2023) menunjukkan upaya pajak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Frijunita dkk. (2024) dan Oktavia & Handayani (2021), menunjukkan bahwa upaya pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah untuk menghitung kinerja keuangan. Sedangkan penelitian sekarang ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah, ketergantungan daerah dan upaya pajak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

Tinjauan Pustaka

Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi menguraikan hubungan kontraktual antara pihak principal dan agen dalam suatu entitas. Principal merupakan pihak yang memberikan mandat atau kontrak kepada agen untuk melaksanakan berbagai aktivitas atas nama principal, termasuk pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi publik, penerapan teori agensi dapat diadaptasi pada negara dengan sistem demokrasi yang berkembang, di mana hubungan antara principal dan agen tetap menjadi dasar utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pengelolaan sumber daya public (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Selanjutnya, dalam penelitian Aulia & Rahmawaty (2020) menjelaskan bahwa permasalahan keagenan tidak hanya terjadi di sektor privat, tetapi juga lazim ditemukan dalam organisasi sektor publik. Dalam sektor privat, konflik keagenan muncul antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen perusahaan sebagai agent yang diberi wewenang untuk mengelola operasional perusahaan. Sementara di sektor publik, permasalahan serupa muncul ketika pemerintah bertindak sebagai agent, sedangkan masyarakat berperan sebagai principal yang mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah. Tujuan utama dari hubungan ini adalah agar pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif demi kesejahteraan rakyat.

Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori stewardship menggambarkan suatu kondisi di mana manajemen tidak terdorong oleh kepentingan pribadi, melainkan berorientasi pada pencapaian tujuan utama yang mengutamakan kepentingan kolektif atau organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks

akuntansi sektor publik, teori ini banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara steward, sebagai pihak yang dipercaya mengelola sumber daya, dan principal, sebagai pemberi kepercayaan. Fokus utama teori ini adalah pada tanggung jawab, loyalitas, dan integritas manajemen dalam menjalankan tugas demi kepentingan public (Riza & Zuripal, 2023).

Teori stewardship sejalan dengan relasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah berperan sebagai steward yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik, sementara masyarakat bertindak sebagai principal atau pemilik sumber daya tersebut (Indrayani & Widiastuti, 2020). Dalam konteks organisasi sektor publik, pemerintah memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan publik secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kembali kepada publik (Dinah & Darsono, 2023).

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian Nugraheni & Adi (2020) Tingkat kekayaan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk dijadikan sumber pembiayaan daerah. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijadikan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kekayaan daerah. Peningkatan PAD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah (Maulidya & Yuliansyah, 2022). Dengan demikian, setiap peningkatan tingkat kekayaan daerah yang berhasil dicapai oleh pemerintah daerah akan berkontribusi terhadap perbaikan kinerja keuangan daerah tersebut. Oleh karena itu, penelitian Defitri dkk (2021) yang menunjukkan bahwa kekayaan daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan penelitian Setiawan dkk (2020) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
H₁: Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Aulia & Rahmawaty (2020) Ketergantungan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mengandalkan penerimaan dari pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan ini diukur melalui besarnya dana perimbangan yang dialokasikan oleh pusat kepada pemerintah daerah. Semakin besar proporsi dana perimbangan yang diterima, semakin tinggi tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pusat. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah karena mengurangi insentif untuk menggali potensi pendapatan daerah secara mandiri serta melemahkan kapasitas daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Setiani & Ismunawan, 2022). Oleh karena itu, penelitian menurut Aziz & Kusumawati (2024) yang menunjukkan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan penelitian Setiani & Ismunawan (2022) menunjukkan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₂: Ketergantungan Daerah berpengaruh Negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian Oktavia & Handayani (2021) Upaya pajak merujuk pada serangkaian langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Upaya ini berperan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara mandiri. Semakin tinggi tingkat efektivitas upaya pajak yang dilakukan, maka potensi penerimaan pajak daerah akan semakin besar, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemandirian fiskal dan memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah (Fadhli dkk., 2023). Oleh karena itu, penelitian Fadhli dkk., (2023) hal ini menunjukkan bahwa upaya pajak secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang diukur melalui rasio kemandirian daerah. Artinya, semakin optimal upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal yang dicapai pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya., dan penelitian Riza & Zuripal (2023) yang di mana upaya pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃: Upaya Pajak berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan rumusan masalah deskriptif dan asosiatif dalam bentuk hubungan kausal. Penelitian dilakukan pada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.jabar.bps.go.id. Penelitian dilaksanakan sejak April 2025 hingga selesai. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode nonprobability sampling dengan pendekatan sensus (sampling total), di mana seluruh populasi dimasukkan sebagai sampel penelitian. Populasi terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat, sehingga total terdapat 27 entitas pemerintah daerah dengan periode pengamatan selama 5 tahun, menghasilkan 135 unit data observasi.

Pengujian asumsi klasik dilakukan diantaranya: a) uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan alat Kolmogorov-smirnov (K-S). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas Asymp Sig. (2-tailed) > 0,05. Sebaliknya apabila nilai signifikan atau probabilitas Asymp Sig. (2-tailed) < 0,05; maka data penelitian dinyatakan tidak berdistribusi normal; b) uji multikolinearitas. Uji Multikolinearitas dengan ketentuan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel > 0,1 dan nilai VIF < 10; c) uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini melalui hasil Grafik *scatterplot*, apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak memiliki masalah heteroskedastisitas; dan d) uji autokorelasi. Uji autokorelasi berdasarkan nilai Durbin-Watson (DW). Berdasarkan perhitungan nilai pada tabel Durbin-Watson untuk taraf signifikan $\alpha = 5\%$, jumlah pengamatan = 135, dan jumlah variabel independen sebanyak 3 variabel, diperoleh nilai dU sebesar 1,745 dan 4-dU sebesar 2,2355. Maka diperoleh hasil uji Durbin-Watson dengan nilai dU (1,7645) < dW < 4-dU (2,2355).

Uji t dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Kriteria yang diambil yaitu jika $t_{hitung} > t_{tabel}$; maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan uji F dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$; maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara nol dan satu. Jika nilai mendekati 1 (satu), maka semakin besar proporsi variasi dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sebaliknya, jika nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen masih terbatas.

HASIL

Tabel 2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)

		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,52790728
Most Extreme Differences	Absolute	0,074
	Positive	0,074
	Negative	-0,050
Test Statistic		0,074
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,066
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	0,068
	99% Confidence Interval	0,061
		0,074

Sumber: data olahan

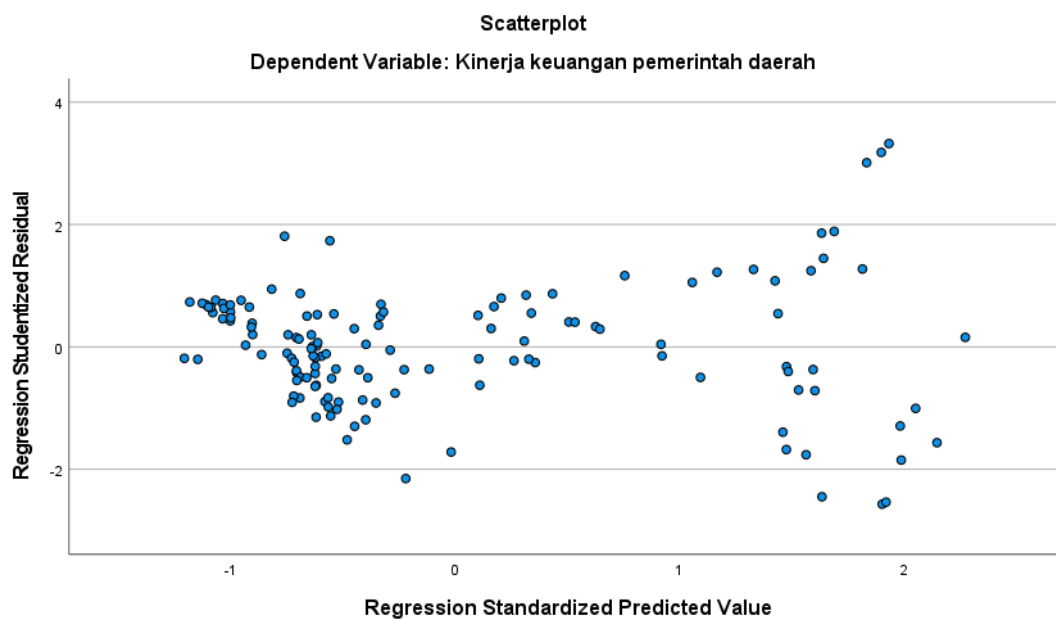
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa uji normalitas data yang menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat dari hasil *Asymp.Sig. (2-tailed)* mempunyai nilai sebesar 0,066 atau nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. sehingga disimpulkan bahwa variabel dependen dan variabel independen

dalam penelitian ini berdistribusi normal. Sedangkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada semua variabel > 0,1; sedangkan untuk nilai VIF pada semua variabel < 10; sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat korelasi atau tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolonearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Tingkat Kekayaan Daerah	0,235	4,252
Ketergantungan Daerah	0,289	3,457
Upaya Pajak	0,434	2,303

Sumber: data olahan



Sumber: data olahan

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan Tabel 4 diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,917; maka nilai $dU (1,7645) < 1,917 < 4-dU (2,2355)$. Berdasarkan hasil tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdeteksi adanya autokorelasi.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.847 ^a	0,717	0,710	12,72596	1,917

Sumber: data olahan

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	11,089	3,008		
Tingkat Kekayaan Daerah	1,750	0,042	0,851	41,369	0,000
Ketergantungan Daerah	-0,318	0,041	-0,143	-7,728	0,000
Upaya Pajak	1,007	0,610	0,025	1,650	0,101

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 5, maka model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 11,089 + 1,750 X_1 - 0,318 X_2 + 1,007 X_3$$

Model penelitian tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 11,089 menunjukkan bahwa ketika tingkat kekayaan daerah (X_1), ketergantungan daerah (X_2), dan upaya pajak (X_3) bernilai nol (0), maka kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) bernilai 11,089.
2. Nilai koefisien regresi variabel tingkat kekayaan daerah (X_1) bernilai positif sebesar 1,750. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan tingkat kekayaan daerah meningkat 1% (naik satu satuan), maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 1,750. Semakin meningkatnya tingkat kekayaan daerah maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan semakin meningkat.
3. Nilai koefisien regresi variabel ketergantungan daerah (X_2) bernilai negatif sebesar -0,318. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan ketergantungan daerah meningkat 1% (naik satu satuan), maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar -0,318. Semakin meningkatnya ketergantungan daerah maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin menurun.
4. Nilai koefisien regresi variabel upaya pajak (X_3) bernilai positif sebesar 1,007. Artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan upaya pajak meningkat 1% (naik satu satuan), maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 1,007. Semakin meningkatnya upaya pajak maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Tabel 5 juga menjelaskan nilai t_{tabel} dengan rumus $(\alpha/2 : n-k-1)$ dimana nilai n = jumlah data dan k = jumlah variabel independen, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebagai berikut:

$$t_{tabel} = t (\alpha/2 : n-k-1) = t (0,05/2 : 135-3-1) = 1,978$$

Berdasarkan hasil pengujian parsial dan nilai t_{tabel} , maka hipotesis pertama (H_1) penelitian ini adalah variabel tingkat kekayaan daerah (X_1) dengan nilai t_{hitung} 41,369 > t_{tabel} 1,978; maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah daerah telah mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerahnya dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat serta mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa di mana pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal demi kepentingan masyarakat, yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Defitri dkk. (2021), Setiawan dkk. (2020) dan Lestari dkk. (2019) yang menunjukkan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut setiap tingkat kekayaan daerah meningkat akan mendorong kenaikan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah, begitupun sebaliknya ketika tingkat kekayaan daerah menurun, kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri juga akan menurun yang akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sedek & Kusumawati (2024) dan Aziz & Kusumawati (2024) yang

menunjukkan tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini, karena tingkat kekayaan daerah belum tentu diiringi dengan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan aset atau sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa variabel ketergantungan daerah (X_2) dengan nilai $t_{hitung} -7,728 > t_{tabel} -1,978$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahannya, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah tidak akan mengalami peningkatan, bahkan mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan terdapat adanya konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang di mana pemerintah daerah cenderung memilih menggunakan pendapatan transfer yang diberikan oleh pusat dibanding menggunakan pendapatan asli daerahnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhayati dkk (2021) menunjukkan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut setiap ketergantungan daerah mengalami penurunan akan mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah atau sebaliknya semakin tinggi kondisi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin menurun. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sedek & Kusumawati (2024) dan Setiani & Ismunawan, (2022) menunjukkan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian, penelitian Aulia & Rahmawaty (2020), Nugraheni & Adi (2020) yang menyatakan bahwa ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut, pengaruh ketergantungan daerah dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kondisi daerah masing-masing.

Hipotesis ketiga (H3) penelitian ini menyatakan bahwa variabel upaya pajak (X_3) dengan nilai $t_{hitung} 1,650 < t_{tabel} 1,978$; maka dapat dikatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel upaya pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak dengan cara menggali dan mengoptimalkan potensi pajak tidak akan berkontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan upaya pemerintah daerah agar memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban, dengan menggunakan pendapatan asli daerahnya perlu memikirkan solusi yang lebih optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Frijunita dkk (2024) dan Oktavia & Handayani (2021) yang menunjukkan bahwa upaya pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menggunakan rasio kemandirian daerah. Hal ini karena dalam rasio upaya pajak daerah dari waktu ke waktu mengalami kenaikan dan penurunan, selain itu pemerintah daerah masih cenderung bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Akibatnya, tingginya upaya pajak belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fadhli dkk. (2023), Riza & Zuripal (2023) dan Oktavianti dkk (2023) yang menunjukkan upaya pajak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut, karena adanya daerah yang berhasil mengelola pajak secara optimal, sehingga pendapatan asli daerah mendorong kinerja keuangan daerah yang lebih baik.

Tabel 6
Hasil Uji Simultan (Uji F)

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73530,781	3	24510,260	3305,688	.000 ^b
	Residual	971,309	131	7,415		
	Total	74502,090	134			

Sumber: data olahan

Tabel 6 menjelaskan bahwa F_{tabel} dengan rumus $(k : n-k)$ dimana k = jumlah variabel independen dan n = jumlah data, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,67. Hasil pengujian menunjukkan F_{hitung}

$3305,688 > F_{\text{tabel}} 2,67$; maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel tingkat kekayaan daerah (X_1), ketergantungan daerah (X_2), dan upaya pajak (X_3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi dan rendahnya suatu persentase dari variabel independen, yaitu tingkat kekayaan daerah, ketergantungan daerah, dan upaya pajak akan bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Tabel 7 menjelaskan nilai koefisien determinasi model penelitian ini sebesar 71,7%. Nilai tersebut berarti menandakan bahwa 71,7% kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu tingkat kekayaan daerah, ketergantungan daerah, dan upaya pajak, sedangkan sebesar 28,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.847 ^a	0,717	0,710	12,72596

Sumber: data olahan

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel tingkat kekayaan daerah, ketergantungan daerah dan upaya pajak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun secara parsial variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, variabel ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan variabel upaya pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, G., Surya, R. A. S., Silfi, A., 2016, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (BPK) dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau), *JOM FEKON*, 3(1), 1036-1050
- Aulia, R., Rahmawaty, R., 2020. Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598.
- Aziz, A. A., Kusumawati, E., 2024. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6984–6995.
- Dasmar, T., Basri, Y. M., Indrawati, N., 2020. Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 39–57.
- Defitri, S. Y., Fetrisia, S., Maison, W., 2021. Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ekonomia*, 11(1), 10–19.
- Dinah, L. S., Darsono, D., 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3).
- Donaldson, L., Davis, J. H., (1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Fadhli, F., Asnawi, A., Jummaini, J., 2023. Peran Tax Effort pada Pengaruh Flypaper Effect dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(2), 143–155.

Yunita Sri Rahayu, Raden Budi Hendaris: *Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Ketergantungan Daerah dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)*

- Frijunita, S., Gurendrawati, E., Utaminingtyas, T. H., 2024. Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 256–269.
- Hendaris, R. B., Sastradipraja, U., 2024. *Analysis of Factors Affecting Local Government Financial Performance. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(5), 5399–5410.
- Indrayani, K. D., Widiastuti, H., 2020. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Lestari, K., Rahayu, S., Yudi, Y., 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal)*, 4(2), 53–67.
- Maulidya, F., Yuliansyah, R., 2022. The Effect of Regional Wealth, Regional Dependence Level, and Regional Financial Independence on Fiscal Performance. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 2(1), 43–54.
- Natoen, A., Febriyanti, A., Sarikadarwati, S., Ardiani, S., 2019. Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106–117.
- Nugraheni, E., Adi, P. H., 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42.
- Nurhayati, N., Fitriana, R., Isrowiyah, A., Zahroh, F., Widyani, I. P., 2021. Does Wealth Levels, Reliance and Leverage Influence Financial Performance? *General Management*, 22(185), 177–183.
- Oktavia, C., Handayani, N., 2021. Pengaruh PAD, *Tax Effort*, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).
- Oktavianti, A. N., Mulyani, H. S., Ginanjar, Y., Sulviani, A., Suhendar, D., 2023. The Effect of Local Own Source Revenue, Tax Effort, and Capital Expenditure on The Level of Regional Financial Independence (Study on District/City Government in West Java Province Period 2019-2021). *Finance and Business Management Journal*, 1(1), 39–45.
- Primadiva, P. P., Rosdini, D., Mulyani, S., 2021. Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 299–310.
- Putra, V. D. C., Romli. 2020. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 17(1), 46-65.
- Riza, R., Zuripal, Z., 2023. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas PAD dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1961–1973.
- Sedek, S. C. B. T., Kusumawati, E., 2024. Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9081–9100.
- Setiani, I., Ismunawan, I., 2022. Pengaruh Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 261–276.
- Setiawan, R., Magnaz Lestira, O., Purnamasari, P., 2020. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, dan Hasil Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Akuntansi*, 6(1), 484-488